

Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi

Dodi Chandra¹, Syurya Hidayat², Rosmeli²

¹Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

²Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi; 2) dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi. Hasil analisis menemukan bahwa: 1) rata-rata dana perimbangan yang diperoleh Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 adalah sebesar Rp 3.854.250.067, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 sebesar 6,64 % pertahun. Selanjutnya rata-rata tingkat ketimpangan antar daerah adalah sebesar 0,38, yang terkategori sedang; 2) Dana perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Namun demikian, dana perimbangan juga berdampak buruk terhadap peningkatan ketimpangan antar daerah

Kata kunci: dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan

PENDAHULUAN

Sebelum otonomi daerah tahun 2001, Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Hal tersebut tercermin dari adanya dominasi pemerintahan pusat dalam merencanakan dan menetapkan prioritas pembangunan di daerah, serta kurang melibatkan *stakeholders* di daerah. System pengaturan keuangannya adalah model pengaturan keuangan yang sangat sentralistis dan lebih menguntungkan pemerintah pusat.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Luasnya kewenangan daerah ini menyangkut semua aspek pemerintah dan kemasyarakatan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terakait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah, antara daerah dengan Pemerintahan Provinsi dan antara daerah dengan pemerintahan pusat dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Dampak ketergantungan daerah pada pusat antara lain tidak berkembangnya desentralisasi keuangan daerah dan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Waluyo, 2007).

Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah serta wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahrizal, 1997). Desentralisasi fiskal mulai dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian Waluyo (2007) juga menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia diduga lebih didominasi oleh mekanisme dana alokasi umum yang berfungsi sebagai pemerata fiskal daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang diharapkan oleh setiap daerah otonom di masa desentralisasi fiskal ini adalah bagaimana setiap pemerintah daerah berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah-nya yang akan berpengaruh besar terhadap pembangunan di daerah.

Dari pelaksanaan desentralisasi selama ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pada umumnya adalah ketidakcukupan sumber daya keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mempunyai finansial yang cukup dan lebih leluasa dalam mengelola keuangannya. Dalam pemberian wewenang itu sendiri harus meliputi kewenangan dalam mengelola keuangan (desentralisasi fiskal). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Adi, 2006 dalam Ahmad, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis: 1) perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi; 2) dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, sehingga menggambarkan bahwa perekonomian Negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

a. Teori pertumbuhan ekonomi Frederich List (1789 -1846)

Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Frederich List adalah tingkat – tingkat yang dikenal dengan sebutan *Stufen thorien* (teori tangga). Menurut Frederich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut

- Masa berburu dan mengembara.
 - Masa berternak dan bertanam.
 - Masa bertani dan kerajinan.
 - Masa kerajinan, industri dan perdagangan.
- b. Teori pertumbuhan ekonomi Karl Bucher (1847 – 1930)
Pada tahap perekonomian menurut Karl Bucher ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu:
- Rumah tangga tertutup
 - Rumah tangga kota
 - Rumah tangga bangsa
 - Rumah tangga dunia
- c. Teori pertumbuhan ekonomi Bruno Hildebrand
Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar-menukarnya, yaitu:
- Masa tukar-menukar secara barter
 - Masa tukar-menukar dengan uang
- d. Teori perkembangan ekonomi Wegner Sombart (1863 – 1947)
Menurut Wegner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :
- Masa perekonomian tertutup
 - Masa kerajinan dan pertukangan
 - Masa kapitalis
- e. Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitmen Rostow (1916 -1979)
W.W.Rostow mengungkapkanteori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 yaitu :
- masyarakat Tradisional (*The traditional society*)
 - masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*The precondition for take off*)
 - Periode Lepas Landas (*The take off*)
 - Gerak menuju kedewasaan (*Maturity*)
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Neoklasik
- a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik
- Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith
“*An Inquiry into the nature and causes of the welth of the nation*” teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hand*. Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total, sedangkan pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut 1)sumber-sumber alam, 2)tenaga kerja/pertumbuhan penduduk, 3)jumlah persediaan.
 - Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus
Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan

(hasil produksi) akan bertambah menurut deret ukur sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan.

b. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Analisis Solow selanjutnya membetuk formula mamatik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut. Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

- Teori pertumbuhan ekonomi Robert Solow

Robert Solow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan output yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama, yaitu modal dan tenaga kerja.

- Teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar

Menurut RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947, pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.

- Teori pertumbuhan ekonomi Joseph Schumpeter

Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu Negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi tidak ada pertumbuhan ekonomi.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah.

Dana perimbangan dipisahkan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Pajak Penghasilan (PP) Pasal 25 dari Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

4. Dana Perimbangan Provinsi

Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu proses yang menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu (Pratiwi:2011).

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah :

- a. Ketidaksetaraan anugrah awal (*initial endowmen*) diantara pelaku-pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan anugrah awal yang dimaksud adalah adanya kesenjangan bekal “resources” yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi yang tersedia tidak sama antar daerah, begitu pula yang lainnya seperti capital, keahlian/keterampilan, serta bakal atau potensi

- b. Strategi pembangunan yang tidak tepat cenderung berorientasi pada pertumbuhan.
- c. Adanya migrasi tenaga kerja.
- d. Adanya pergerakan modal ke daerah inti.
- e. Mekanisme *trickle down Effect* tidak berjalan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi anatar daerah sebagai berikut :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
2. Perbedaan kondisi geografis
3. kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. konsentrasi ekonomi daerah
5. Alokasi dana pembangunan antar daerah

Studi Terdahulu

Penelitian Mahroji, (2005) yang berjudul “*Ketimpangan pendapatan Di Indonesia*” menunjukkan bahwa masih terjadinya ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2001, yang disebabkan adanya kelebihan dana penerimaan di pemerintah pusat. Kesimpulan berdasarkan hasil indeks Williamson dan koefisien variasi yang paling kecil. Variable kebijakan ini terhadap *base line, impact multiplier* kemudian akan diketahui. Variable kebijakan yang digunakan untuk melakukan simulasi yaitu: PBB, BPHTB, PPh, BHSDA, dan DAU.

Penelitian Waluyo,(2007) yaitu berjudul “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Daerah Di Indonesia*” dengan menggunakan dua model yaitu model ekonometrik simultan dan model deterministik menunjukkan, bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme transmisi, yaitu: 1) Melalui mekanisme pemberian dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil sumber daya alam (DBHSDA), 2) Melalui mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Di samping itu kebijakan bagi hasil SDA memperburuk kesenjangan pendapatan antar daerah. Kebijakan DAU sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah.

Rosmeli (2010) yang berjudul “*Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia*”. Hasil dari penelitiannya yaitu : 1) Semenjak diimplementasikannya desentralisasi fiskal berdampak pada semakin meluasnya disparitas antar wilayah di Indonesia bila dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang berkisar pada angka 0,8111. 2) Selama periode 1990-2008 alokasi dana untuk sektor kesehatan, penanaman modal dalam Negeri dan transfer pemerintah pusat ke daerah memperbesar disparitas antar wilayah di Indonesia, sedangkan alokasi dana untuk pendidikan dan infrastruktur jalan memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series selama tahun 2001 – 2013 yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, jumlah penduduk dan PDRB. Sumber utama data adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi serta kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

Alat analisis

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan rumus:

$$P = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana : PE = Pertumbuhan Ekonomi
 PDRB_t = PDRB tahun sekarang
 PDRB = PDRB tahun sebelumnya

Untuk menghitung ketimpangan daerah maka digunakan rumus:

$$W = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

Dengan ukuran ketimpangan nya di lihat dari alokasi dana Perimbangan.

Dimana : WI : Nilai / Indeks ketimpangan daerah
 Yi : Pendapatan perkapita masing-masing daerah
 Y : Total pendapatan perkapita Provinsi Jambi
 Fi : Jumlah penduduk masing-masing daerah
 N : Jumlah penduduk Provinsi Jambi

Nilai koefisien variasi ketidakmerataan yang diperoleh dengan menggunakan rumus diatas terletak antara 0 dan 1, jika mendakati 0, maka ketidakmerataan pembagian pendapatan antar daerah relative kecil, apabila mendekati 1 berarti ketidakmerataan antar daerah relatif besar.

Untuk menganalisis dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan model regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + e$$

Dimana : Xi = Dana Perimbangan
 Yi = Pertumbuhan Ekonomi
 i = Observasi ke 1,2,3,..... n

Untuk menganalisis dampak dana perimbangan terhadap ketimpangan antar daerah digunakan model regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + e$$

Dimana : Xi = Dana Perimbangan
 Yi = Ketimpangan Antar Daerah
 i = Observasi ke 1,2,3,..... n

Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan adalah dana perimbangan di Provinsi Jambi tahun 2001-2013 dalam satuan juta rupiah.

2. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2001-2013 dalam satuan persen.
3. Ketimpangan pendapatan adalah hasil perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jambi dalam satuan Indeks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi

Tabel 1 memberikan gambaran mengenai perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Berdasarkan data tersebut, rata-rata dana perimbangan yang diperoleh Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 adalah sebesar Rp 3.854.250.067. Angka ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dalam jumlah dan persentase peningkatan yang bervariasi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 sebesar 6,64 % pertahun. Jika dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi juga menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terendah pada tahun 2003 yaitu 5,00% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,69%.

Selanjutnya rata-rata tingkat ketimpangan antar daerah selama periode Tahun 2001 – 2013 yang diukur dari nilai koefisien variasi ketidakmerataan menggunakan Indeks Williamson Indeks adalah sebesar 0,38. Indeks Williamson terletak antara 0 dan 1, jika mendekati 0, maka ketidakmerataan pembagian pendapatan antar daerah relatif kecil, apabila mendekati 1, berarti ketidakmerataan antar daerah relatif besar. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, jika dilihat perkembangan antara Tahun 2001 – 2013, terjadi peningkatan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Perkembangan dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar daerah Provinsi Jambi, Tahun 2001 - 2013

Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pertumbuhan ekonomi (%)	Tingkat ketimpangan
2001	1.075.159.632	6,65	0.32
2002	1.396.423.850	5,86	0.32
2003	1.734.116.751	5,00	0.33
2004	1.853.382.599	5,38	0.37
2005	2.012.746.600	5,57	0.41
2006	3.618.667.573	5,89	0.39
2007	3.839.712.217	6,82	0.41
2008	4.363.843.492	7,16	0.40
2009	4.587.945.744	6,39	0.39
2010	4.853.149.966	7,35	0.40
2011	6.029.785.463	8,54	0.39
2012	6.598.671.782	8,69	0.40
2013	8.141.645.200	7,07	0.40
Rata-rata	3.854.250.067	6,64	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2000-2014

Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Hasil estimasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi diberikan sebagai berikut:

$$\log Y_i = -20.54922 + 2.859461 \log X_i$$

Dari hasil estimasi dapat dijelaskan bahwa apabila dana perimbangan yang ditransfer ke daerah meningkat 1 persen, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi juga akan meningkat sebesar 2,8594 persen. Dengan kata lain perkembangan pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh besar kecilnya dana perimbangan dan bagaimana daerah tersebut mengelolanya. Hal ini juga berarti bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mampu mengalokasikan dana perimbangan tersebut dengan baik, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah ini.

Dampak Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Antar Daerah

Hasil estimasi pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan antar daerah Provinsi Jambi diberikan sebagai berikut:

$$\log Y_i = -0,525662 + 0,095210 \log X_i$$

Dari hasil estimasi ini dapat dijelaskan bahwa apabila dana perimbangan yang ditransfer ke daerah meningkat 1 persen, maka tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 0,095210 persen. Fakta ini memberikan arti bahwa meskipun dana perimbangan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, tetapi di sisi lain berdampak buruk pada peningkatan ketimpangan antar daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata dana perimbangan yang diperoleh Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 adalah sebesar Rp 3.854.250.067, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama Tahun 2001 – 2013 sebesar 6,64 % pertahun. Selanjutnya rata-rata tingkat ketimpangan antar daerah adalah sebesar 0,38, yang terkategori sedang.
2. Dana perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Namun demikian, dana perimbangan juga berdampak buruk terhadap peningkatan ketimpangan antar daerah

Saran

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran yang proporsional guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi, alokasi anggaran ini harus mampu untuk mendorong agar pembangunan antar daerah guna peningkatan pertumbuhan ekonomian daerah bisa cepat dan nantinya tidak akan tertinggal dengan kabupaten/kota yang lainnya.
2. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang. pemerintah juga perlu mengkaji ulang sekto-sektor unggulan mana saja yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembanguna*: edisi kedua, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Dartanto, Teguh dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003. "Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah: Analisa Model Ekonomi Makro Simultan." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 4, No. 1 Juli.
- Damodar N. Gujarati. 1995. "Basic Econometrics Thir Edition". Mc Graw-Hill International Edition.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- <http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-dana-perimbangan-atau-dana.html>
- <http://ceptt094.blogspot.co.id/2013/07/teori-pertumbuhan-ekonomi-menurut-para-ahli>.
- <http://fallinglol.wordpress.com/2013/12/26/ekonomi-regional-5-ketimpangan-pembangunan-antar-wilayah>.
- <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan-sumber-pendapatan-daerah-terbesar>
- <http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-asumsi-klasik.html>
- <http://www.skyscrapercity.com/provinsi-jambi-project-and-development>
- [Http://www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 2014
- Jhingan, M.L, 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi 12*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Junaidi, J; Zulgani, Z. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Edisi 3, 27-33
- Mahi, Raksaka, 2001. "Problem on the Design and Implementation of Fiscal Decentralization Policy." Makalah pada Th 3rd IRSA International Conference, Jakarta, March.
- , 2002 (a). "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal." *Media Indonesia* edisi Kami's, 03 Januari.
- , 2002 (b). "Dana Perimbangan Pendukung Otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal." *Media Indonesia* edisi senin dan selasa, 18 dan 19 Februari.
- , 2002 (c). "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah." Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
- , 2005. "Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 Juli.
- Mahroji, Dwi, 2005. "Pengaruh Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Antara Pusat dan Daerah Terhadap Kondisi Keuangan Pusat dan Kabupaten/Kota di Indonesia." Tesis Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indoensia, Depok.
- Rosmeli, 2010. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia.
- Sekretariat Negara RI, 2000. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah." Jakarta, Indonesia.
- , 2000. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah." Jakarta, Indonesia.

- Siagian, 2010. *“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat).”*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional*
.....Nomor 32 tahun 2004 *.Tentang pemerintah daerah*
.....Nomor 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah.*
- Waluyo, Joko, 2007. *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan Antardaerah di Indonesia.*